

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH
TAHUN 2019-2023**



Disusun Oleh:

**MUHIBBUSH SHABARI
NIM : 210602055**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhibbush Shabari

NIM : 210602055

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2026

Yang Menyatakan



Muhibbush Shabari

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2023

Disusun Oleh:

Muhibbush Shabari

NIM. 210602055

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A

NIP. 197204282005011003

Jalilah, S.H.I., M.Ag.

NIP. 198806082023212040

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

AR-RANIRY

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I

NIP. 197612172009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhibbush Shabari
NIM : 210602055
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 210602055@student.ar-raniry.ac.id

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul :

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2023”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Januari 2026

Mengetahui

Penulis

Muhibbush Shabari
NIM. 210602055

Pembimbing I

Dr. Muhammad Zubulmi, S.Ag., M.A.
NIP. 197204252005011003

Pembimbing II

Jatilah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198806082023212040

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, segala urusan yang dianggap sulit menjadi mudah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2023”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana dari Prodi Ekonomi Syariah. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Dalam kesempatan ini tidak lupa pula penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I dan Muksal, S.E.I., M.E.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A. selaku Pembimbing I, dan Jalilah, S.H.I., M.Ag. selaku Pembimbing II. Terima kasih banyak telah sabar membimbing, memberi arahan, serta tak henti-hentinya menguatkan. Setiap saran, masukan, dan dukungan yang diberikan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan yang tiada batas.
5. Junia Farma, M.Ag selaku penguji I dan Cut Elfida, S.HI., M.A selaku penguji II yang telah memberikan masukan, saran, dan perbaikan untuk skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.
6. Mursalmina, M.E. selaku Penasehat Akademik, dan kepada seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Muzakkir, dan Ibunda Sunarti yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah menemani dan membantu penulis dalam

suka maupun duka, serta memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah memberi semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini mampu menjadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang.

Akhir kata kita berdoa kehadirat Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Aamin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 22 Januari 2026

A R - R A N Penulis,

Muhibbush Shabari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	1 6	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati ::

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Muhibbush Shabari
NIM : 210602055
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian
Keuangan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi
Islam Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh
Tahun 2019-2023
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Jalilah, S.H.I., M.Ag.

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Namun, tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Aceh masih relatif rendah dan cenderung bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan daerah yang diduga memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2019–2023 dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah yang di publikasi resmi oleh BPK RI perwakilan Provinsi Aceh. Data dianalisis menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan (masalah) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (falah). Optimalisasi PAD yang dikelola secara transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah, sedangkan

pemanfaatan DAU dan DAK perlu dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan dana transfer secara efektif agar pengelolaan keuangan daerah tetap berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Kemandirian Keuangan Daerah, Ekonomi Islam.*



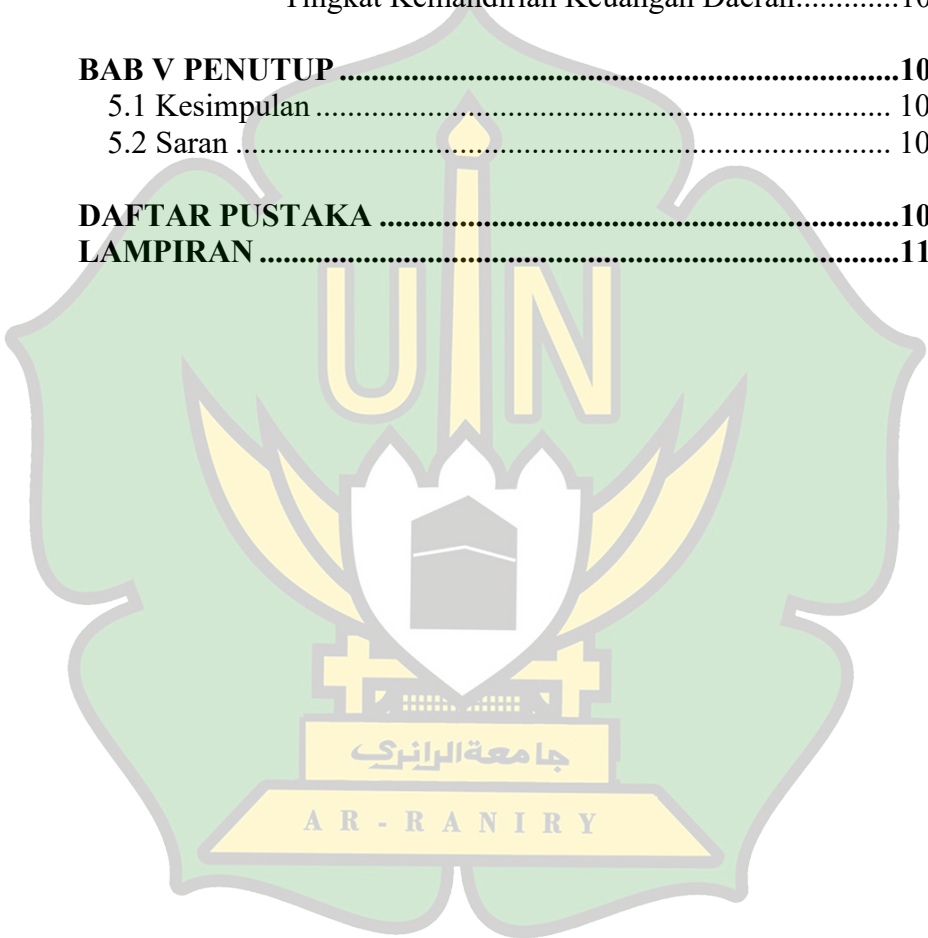
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.4.3 Manfaat Kebijakan	13
1.5 Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Kemandirian Keuangan Daerah	16
2.1.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah	16
2.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.2.2 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah	20
2.2.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	21
2.2.4 Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Islam ..	26
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	28
2.3.1 Pengertian Dana Alokasi Umum.....	28
2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)	30
2.3.3 Indikator Dana Alokasi Umum (DAU).....	31

2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	32
2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)	32
2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK)	34
2.4.3 Indikator Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)	35
2.5 Ekonomi Islam	36
2.5.1 Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam.....	36
2.6 Penelitian Terkait	38
2.7 Keterkaitan Antar Variabel	51
2.7.1 Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam	51
2.7.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam	52
2.7.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam	54
2.8 Kerangka Pemikiran	56
2.9 Hipotesis	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
3.1 Desain Penelitian	58
3.2 Populasi dan Sampel	58
3.2.1 Populasi	58
3.2.2 Sampel	59
3.3 Sumber Data	59
3.4 Definisi dan Operasional Variabel	60
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data	63
3.6 Analisis Statistik Deskriptif	65
3.7 Model Estimasi Regresi Data Panel.....	66
3.7.1 Common Effect Model (CEM)	66
3.7.2 Fixed Effect Model (FEM)	66
3.7.3 Random Effect Model (REM).....	66
3.8 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	67
3.8.1 Uji Chow	67
3.8.2 Uji Hausman	68

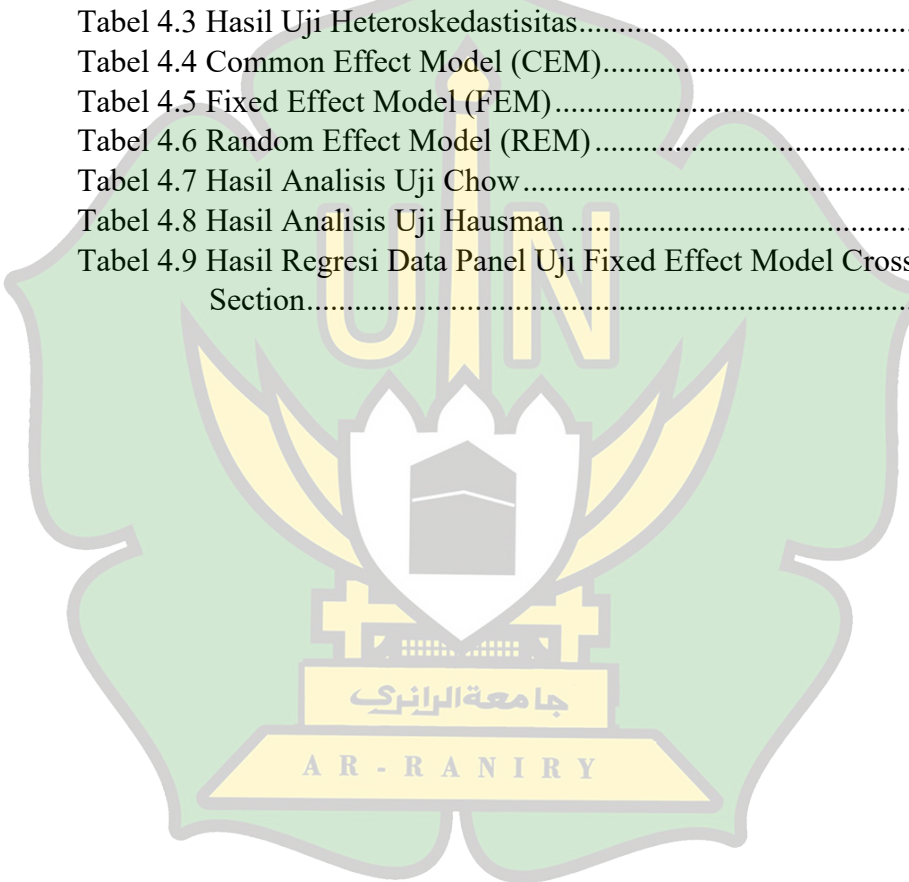
3.8.3 Uji Lagrange Multiplier (LM).....	68
3.9 Uji Asumsi Klasik.....	69
3.9.1 Uji Multikolinearitas	70
3.9.2 Uji Heteroskedastisitas.....	70
3.10 Uji Hipotesis	71
3.10.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t).....	71
3.10.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistic F) ..	71
3.10.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Hasil Penelitian	73
4.1.1 Deskripsi Data Penelitian.....	73
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	73
4.2.1 Kemandirian Keuangan Daerah	73
4.2.2 Pendapatan Asli Daerah	75
4.2.3 Dana Alokasi Umum.....	77
4.2.4 Dana Alokasi Khusus.....	78
4.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	80
4.4 Hasil Asumsi Klasik	82
4.4.1 Hasil Uji Multikolinieritas	82
4.4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	83
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis	84
4.5.1 Pemilihan Kesesuaian Model.....	84
4.5.2 Uji Spesifikasi Model Regresi	86
4.5.3 Regresi Model <i>Fixed Effect</i>	88
4.5.4 Hasil Uji Signifikan Parameter Individu (Uji Statistik t).....	90
4.5.5 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	91
4.5.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	92
4.6 Pembahasan	92
4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	92
4.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	96

4.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam	99
4.6.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	103
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	114



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Skala Kemandirian Keuangan Daerah	18
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	45
Tabel 3.1 Definisi dan Operasional Variabel	61
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	80
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	82
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	83
Tabel 4.4 Common Effect Model (CEM).....	84
Tabel 4.5 Fixed Effect Model (FEM).....	85
Tabel 4.6 Random Effect Model (REM).....	86
Tabel 4.7 Hasil Analisis Uji Chow.....	87
Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji Hausman	88
Tabel 4.9 Hasil Regresi Data Panel Uji Fixed Effect Model Cross Section.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Aceh 2019-2023.....	4
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	56
Gambar 4.1 Grafik Kemandirian Keuangan Daerah	74
Gambar 4.2 Grafik Pendapatan Asli Daerah	76
Gambar 4.3 Grafik Dana Alokasi Umum.....	77
Gambar 4.4 Grafik Dana Alokasi Khusus	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	114
Lampiran 2 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....	117
Lampiran 3 Output eviws	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi tahun 1998 menjadi awal perubahan besar bagi sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang muncul adalah kebijakan otonomi daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah dengan memanfaatkan potensi pendapatan lokal secara optimal. Kebijakan ini sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Melalui aturan ini, daerah diberikan kesempatan untuk mengelola keuangannya sendiri dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Riskiyani & Nasir, 2021).

Menurut Halim (2014), kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai secara mandiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur melalui perbandingan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah

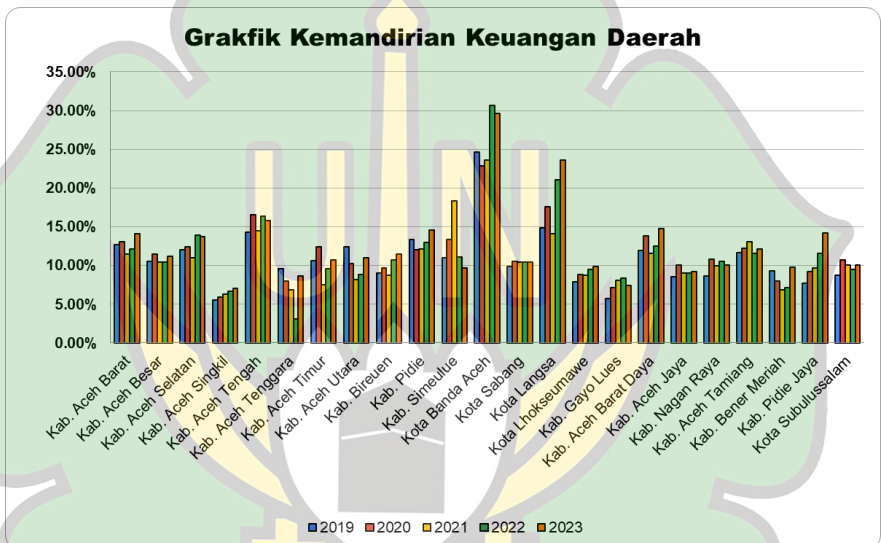
(PAD) dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian, maka semakin rendah ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal, khususnya pemerintah pusat dan provinsi.

Kemandirian keuangan menjadi tujuan utama bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Namun di balik cita-cita tersebut, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat (Nurjanah, 2025). Berdasarkan kajian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2019, hanya satu dari 542 daerah yang sudah berkategori sangat mandiri secara fiskal, delapan provinsi dan dua kota tergolong mandiri, sedangkan sisanya termasuk kategori menuju mandiri dan belum mandiri. Berdasarkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), PAD hanya berkontribusi sekitar 28,7%, sedangkan transfer dari pemerintah pusat mencapai sekitar 65,7% terhadap pendapatan daerah. Sama halnya pada tahun 2023, pendapatan daerah juga didominasi oleh transfer dana dari pusat sebesar 64,9% dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pusat dan kemandirian keuangan daerah masih tergolong lemah.

Fenomena lemahnya kemandirian fiskal yang terjadi secara nasional juga dialami oleh Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki status Otonomi Khusus (Otsus), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui kebijakan tersebut, Aceh memperoleh dana tambahan dari pemerintah pusat yang dikenal sebagai Dana Otonomi Khusus, yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan, memperkuat kapasitas fiskal, serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengakui zakat sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pengelolaan zakat di Aceh dilaksanakan secara khusus oleh Baitul Mal Aceh sebagai lembaga independen (non-struktural) yang berada di bawah pengawasan Gubernur. Berdasarkan keistimewaan tersebut, seharusnya Aceh memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Namun, pada kenyataannya, tingkat kemandirian keuangan Provinsi Aceh hingga saat ini masih belum menunjukkan capaian yang optimal. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2023, di mana total pendapatan daerah mencapai Rp10,57 triliun, namun lebih dari 70 persen di antaranya berasal dari dana transfer pusat, sedangkan kontribusi PAD hanya sekitar 28 persen (Fahlevi, 2025).

Permasalahan serupa juga dialami oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Berikut data kemandirian daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2019–2023 :

Gambar 1.1
Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota
Provinsi Aceh 2019-2023



Sumber : BPK RI Prov. Aceh (2026), Diolah Peneliti

Berdasarkan grafik di atas, dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Aceh masih tergolong sangat rendah, yaitu sekitar 11%. Dari 23 kabupaten/kota yang ada, hanya Kota Banda Aceh yang menunjukkan tingkat kemandirian yang relatif lebih baik, yakni dengan rata-rata sebesar 26%, disusul oleh Kota Langsa dengan rata-rata rasio sebesar 18%. Sementara itu, Kabupaten Aceh Singkil mencatat tingkat kemandirian terendah dalam lima tahun

terakhir, yaitu hanya 6%. Sebagian besar daerah lainnya masih berada di bawah angka 15%. Kondisi tersebut memperkuat argumen bahwa meskipun Aceh memperoleh dana tambahan melalui Otsus, namun belum terjadi pergeseran signifikan menuju kemandirian keuangan yang ideal. Hal ini disebabkan minimnya inovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal serta keterbatasan pengetahuan para pemangku kebijakan terhadap instrumen investasi, sehingga ketergantungan struktural terhadap transfer pusat terus berlangsung. Jika dikaitkan dengan pola hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah, maka tingkat kemandirian Provinsi Aceh tergolong dalam kategori kemandirian sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, yaitu hubungan di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (Halim, 2004).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemandirian keuangan daerah merupakan amanah publik yang harus dikelola secara profesional dan berkeadilan oleh pemerintah daerah. Prinsip-prinsip syariah menekankan perlunya keadilan fiskal, efisiensi pemanfaatan sumber daya publik, serta orientasi kebijakan pada kemaslahatan masyarakat luas. Konsep maqashid syariah juga menghendaki agar setiap bentuk pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat pemerataan, serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan (Rahayu, 2020). Dengan demikian, pembahasan mengenai kemandirian fiskal di Aceh tidak hanya relevan dalam konteks regulasi otonomi daerah,

tetapi juga menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang secara formal menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Penekanan pada amanah, keadilan, dan kemaslahatan menjadikan kemandirian keuangan daerah sebagai pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai implikasi dari prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam ekonomi Islam, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus diarahkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. PAD yang bersumber dari aktivitas ekonomi lokal idealnya dikembalikan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta penyediaan fasilitas sosial yang menunjang produktivitas dan kualitas hidup. DAU berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar pelayanan publik di daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas, sedangkan DAK diarahkan pada pembiayaan sektor-sektor prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Optimalisasi ketiga sumber pendanaan tersebut tidak hanya mendorong efisiensi dan kemandirian keuangan daerah, tetapi juga sejalan dengan tujuan maqāshid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan,

dan harta sebagai landasan terwujudnya keadilan sosial dan kemaslahatan umum (Chapra, 2008).

Hasil penelitian Bella et al. (2022) menunjukkan bahwa variabel yang dapat dikatakan sebagai faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan belanja modal. Sementara itu, penelitian Setiawan et al. (2021) mengindikasikan bahwa hanya variabel Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh. Hasil penelitian Machfud et al. (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan hasil penelitian Yulhaq (2024) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, di antaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian Machfud et al. (2020), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi PAD suatu daerah, maka daerah tersebut akan semakin mandiri. Hasil ini juga membuktikan bahwa PAD menjadi prediktor yang dapat

meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Haryanto (2019), Malau dan Parapat (2020) yang menyebutkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan diikuti dengan peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Sedangkan, penelitian oleh Kristina et al. (2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Musfirati dan Sugiyanto (2021) menghasilkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2019) yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan menurun, karena Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2022) menghasilkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya, besar atau kecilnya Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah tidak memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2016) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa seberapa besar pun Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah provinsi di Pulau Sumatera tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan menggunakan Dana Alokasi Khusus, karena penggunaannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuro dan Widiastoeti (2019) yang menyebutkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian oleh Riyadi (2022) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya, semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Di sisi lain, Umasangadji (2025) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, yang berarti semakin besar DAK yang diterima, maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data panel kabupaten/kota di Aceh. Hal ini memungkinkan pengujian hubungan empiris antara

PAD, DAU, DAK, dan kemandirian fiskal secara lebih objektif dan terukur. Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah memperluas kajian keuangan daerah dengan memasukkan perspektif ekonomi Islam, sedangkan kontribusinya adalah memberikan masukan kepada pemerintah daerah Aceh dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan PAD, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, serta mengelola Dana Otsus secara lebih produktif dan sesuai prinsip syariah. Secara lebih luas, penelitian ini juga relevan dengan agenda nasional dalam memperkuat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian dari Aceh diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa terkait ketergantungan fiskal terhadap pusat.

Studi yang secara khusus mengkaji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemandirian fiskal dalam perspektif ekonomi Islam di Aceh masih sangat terbatas. Padahal, Aceh sebagai satu-satunya provinsi dengan penerapan syariat Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang seharusnya mencerminkan prinsip keuangan publik syariah. Oleh sebab itu, kajian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan penelitian sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur keuangan daerah berbasis syariah. Berdasarkan penjelasan di atas serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten dalam menguji variabel yang memengaruhi kemandirian daerah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Penting untuk melakukan penelitian ini agar diketahui faktor-faktor apa saja yang

diperkirakan mampu memengaruhi kemandirian daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2023 Tahun 2019-2023.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota Provinsi Aceh?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota Provinsi Aceh?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota Provinsi Aceh?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota Provinsi Aceh?.....

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang ekonomi publik dan ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan analisis fiskal daerah dan desentralisasi keuangan. Integrasi antara teori desentralisasi fiskal dengan nilai-nilai ekonomi

Islam diharapkan memberikan perspektif baru dalam mengkaji kemandirian keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam meningkatkan strategi pengelolaan keuangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh akademisi, peneliti, dan mahasiswa sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang keuangan daerah berbasis syariah.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal daerah, terutama dalam menyeimbangkan antara kemandirian fiskal dan ketergantungan pada dana transfer pusat. Temuan penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan anggaran daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta sesuai dengan konteks otonomi khusus yang berlaku di Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terstruktur dan sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian ini disusun dalam lima bab utama, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB : I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian awal mengenai pokok permasalahan yang diteliti, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran menyeluruh tentang arah dan fokus penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori yang relevan dengan penelitian, termasuk teori desentralisasi fiskal, teori kemandirian keuangan daerah, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi pendekatan dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data berdasarkan instrumen dan teknik statistik yang telah ditentukan. Hasil tersebut diinterpretasikan dan dibandingkan dengan teori serta temuan terdahulu guna memberikan pembahasan yang mendalam dan kontekstual terhadap kondisi fiskal di Provinsi Aceh.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, serta saran-saran yang dapat diberikan baik untuk pemerintah daerah, pengambil kebijakan, maupun untuk pengembangan penelitian lanjutan yang sejenis.

